

Implementasi Kebijakan Penggunaan Kartu Tani di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Aslan Jufri*¹, Muhammad Syukur ², Bakhtiar ³

¹²³ Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar

¹²³Email: andiaslanjufri@gmail.com., m.syukur@unm.ac.id., bakhtiar@unm.ac.id

Abstract. This study to find: 1) How is the implementation of the farmer card policy in Barugae, Duampanua District, Pinrang Regency, 2) what factors influence the implementation of the farmer card policy in Barugae, Duampanua District, Pinrang Regency. This research approach is descriptive qualitative with a type of case study research. Techniques in determining informants use snowball sampling with considerations, namely: 1) The Head of the Agricultural Service or who represents, 2) The owner of a subsidized fertilizer retailer's kiosk, 3) a farmer who uses a farm card. The number of informants is 10 people. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The data obtained are analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data sharpening using triangulation techniques, namely source, method, and time. The results showed that: 1) The implementation of the farmer card policy in Barugae, Duampanua District, Pinrang Regency, was influenced by several indicators, namely: (a) Communication, (b) Resources, (c) Disposition and (d) Bureaucratic structure. 2) Factors affecting the implementation of the farmer card policy in Barugae, Duampanua District, Pinrang Regency, namely: (a) Policy environment, (b) Policy makers and actors, (c) The policy itself and (d) The group of policy targets.

Keywords: Implementation; Policy; Farmer Card

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana implementasi kebijakan kartu tani di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, 2) faktor-faktor apa yang memengaruhi implementasi kebijakan kartu tani di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik dalam menentukan informan menggunakan snowball sampling dengan pertimbangan yaitu: 1) Kepala Dinas Pertanian atau yang mewakili, 2) Pemilik kios pengecer pupuk subsidi, 3) petani pengguna kartu tani. Jumlah informan sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi data yaitu sumber, metode, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi kebijakan kartu tani di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dipengaruhi oleh beberapa indikator yaitu: (a) Komunikasi, (b) Sumber daya, (c) Disposisi dan (d) Struktur birokrasi. 2) Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan kartu tani di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yaitu: (a) Lingkungan kebijakan, (b) Pembuat dan pelaku kebijakan, (c) Kebijakan itu sendiri dan (d) Kelompok sasaran kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Kartu Tani



Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat subur, negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Dari sisi geografis Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi sehingga memungkinkan banyak jenis tumbuhan yang hidup dan tumbuh dengan cepat. Dari sisi geologi, Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik sehingga banyak terbentuk pegunungan yang kaya akan mineral. Sehingga sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tenaga kerja informal sektor pertanian pada Agustus 2019 di Indonesia sebanyak 67,49% atau 133,56 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2022).

Menurut Wahid (2020) bantuan pemerintah terhadap petani tidak bisa dilepaskan dari tiga hal, khususnya masalah pupuk, benih dan biaya. Pupuk sebagai salah satu hal pokok dalam pertanian membuat pemerintah memberikan bantuan kepada petani yaitu pupuk bersubsidi yang tertuang dalam “Surat Keputusan Menperindag No 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian”. Selain itu, strategi pupuk bersubsidi juga telah diatur dalam “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan” (Permendag, 2013). Berdasarkan “Paturan Menteri Republik Indonesia pada Tahun 2020” jenis pupuk yang dibiayai yang dimaksud adalah pupuk UREA, pupuk SP-36, pupuk ZA, dan pupuk NPK”.

Upaya otoritas publik dalam mengatasi permasalahan terhadap proses pengelolaan, pengalokasian serta peredaran pupuk subsidi adalah dengan kebijakan alokasi pupuk bersubsidi yang dibiayai menggunakan Kartu Tani. Kebijakan Kartu Tani menjadi media Petani untuk mendapatkan pupuk subsidi diberlakukan sebagaimana telah diatur dalam “Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

Tahun Anggaran 2020”.

Kartu Tani adalah kartu yang diberikan oleh bank kepada petani untuk digunakan dalam transaksi pembelian pupuk bersubsidi melalui mesin Electronic Data Capture di pengecer resmi. Electronic Data Capture adalah mesin yang berfungsi sebagai alat transaksi pembelian pupuk bersubsidi dengan memasukkan atau menggesekkan Kartu Tani di pengecer resmi (Kementan, 2021). Strategi ini dilakukan mengingat berbagai peristiwa inkonsistensi penyebaran pupuk bersubsidi sehingga berdampak buruk yang tidak menguntungkan kepada banyak kelompok, terkhusus pada petani. Pada akhirnya, dengan program Kartu Tani dipercaya dalam penyebaran pupuk bersubsidi dapat lebih aman dan on track (Mufidah dan Prabawati, 2018).

Sulawesi Selatan adalah provinsi yang memiliki pengaruh kuat pada sektor pertanian bangsa ini. Pada tahun 2019 Sulawesi Selatan memiliki luas wilayah pertaniannya yaitu 1.010.189 hektar (ha) dan mampu memproduksi padi sebanyak 5.054.167 ton dan produksi beras sebanyak 2.885.324 ton menjadikannya sebagai Provinsi dengan produksi padi dan beras terbanyak di luar pulau Jawa (Badan Pusat Statistik, 2022).

Bupati Pinrang Bapak Andi Irwan Hamid mengatakan “Satu-satunya daerah yang menjadi pilot program Kartu Tani di Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Pinrang” (Kominform, 2020). Kabupaten Pinrang menjadi salah satu Kabupaten dengan tingkat produksi padi yang tinggi. Berdasarkan data pada publikasi Luas Panen dan Produksi Beras Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, produksi padi Kabupaten Pinrang adalah sebesar 336,54 ribu ton yang merupakan produksi tertinggi ketiga setelah Kabupaten Bone dan Wajo. Oleh karena itu, sangatlah menarik perhatian pengguna data dan pengambil kebijakan untuk melihat perkembangan luas tanam maupun luas panen padi serta kendala yang dialami berkaitan dengan kerusakan tanaman seperti puso di Kabupaten Pinrang (Badan Pusat Statistik Pinrang, 2020). Desa Barugae merupakan salah satu desa di Kabupaten Pinrang yang berada di Kecamatan Duampanua. Kecamatan Duampanua menjadi kecamatan dengan luas wilayah persawahan

terluas di kabupaten Pinrang yaitu seluas 15.328 hektar (ha) menjadikan Desa Barugae memiliki andil dalam produksi padi di Sulawesi Selatan terkhusus di Kabupaten Pinrang. Desa Barugae memiliki luas 3.75 km² yang berada pada ketinggian 500m dari permukaan air laut dengan jumlah penduduk sebanyak 1.382 orang (Badan Pusat Statistik Pinrang, 2019).

Mengingat pentingnya manfaat pupuk di lahan pertanian, maka pengaturan pemberian pupuk harus sesuai dengan standar enam tepat dalam “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yaitu: tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu”. Penelitian Sihombing dalam Rais (2021), mengungkapkan bahwa program penyaluran pupuk bersubsidi dari enam standar ternyata belum berhasil, misalnya saja tepat jumlah dimana jumlah pupuk yang masih kurang dan ketersediaan pupuk yang belum dapat memenuhi kebutuhan., sayangnya jenis pupuk yang banyak digunakan oleh petani tidak sesuai dengan pupuk yang digunakan oleh tanaman yang akhirnya mempengaruhi kecukupan petani. Selain itu tepat waktu juga sangat penting bagi petani, pupuk yang benar-benar tersedia ketika diperlukan petani. Sering kali petani mendapati kios tidak mendapatkan pupuk karena pengantaran pupuk yang tidak sesuai dengan jadwal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan kartu tani di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Serta faktor-faktor apa yang memengaruhi implementasi kebijakan kartu tani di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Seperti yang ditunjukkan oleh Creswell (2013) penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki dan memahami implikasi —bahwa berbagai orang atau kelompok orang— dikaitkan dengan masalah sosial atau kemanusiaan. Adapun menurut Gunawan (2013), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengungkap persoalan-persoalan dalam kehidupan kerja pemerintah, swasta, daerah, pemuda, wanita, olah raga, seni dan budaya,

sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai kebijakan yang akan dilaksanakan untuk kepentingan bersama. Adapun studi kasus diperuntukan guna memepelajari dasar masalah, kondisi serta posisi suatu fenomena yang sedang terjadi, kerjasama alami dari unit sosial yang diberikan (Gunawan, 2013).

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah snowball sampling. Snowball sampling adalah suatu metode untuk menentukan sampel yang mula-mula jumlahnya sedikit, kemudian sampel ini diarahkan untuk memilih teman yang dapat menjadi sampel selanjutnya dan begitu seterusnya dengan tujuan agar jumlah sampel bertambah (Sugiyono, 2016). Berikut pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan dalam menetapkan informan penelitian: 1) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang atau yang mewakilinya. 2) Penjual pupuk/pengecer pupuk bersubsidi yang menerima transaksi pupuk bersubsidi dari petani Desa Barugae. 3) Petani di Desa Barugae yang menggunakan Kartu Tani. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi data menurut Sugiyono (2016) terdiri dari; 1) Sumber, peneliti menyelidiki serta mengumpulkan data perihal subjek yang diteliti dari berbagai sumber yang berbeda yang dipandang relevan dengan penelitian yang dilakukan. 2) Metode, peneliti melakukan pemeriksaan ulang menggunakan teknik yang berbeda. Metode yang digunakan dalam pengujian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 3) Waktu, penilaian pada waktu atau pada kesempatan yang berbeda. Teknik ini memiliki potensi untuk meningkatkan akurasi, kepercayaan, kerincian, serta kedalaman data. selain triangulasi juga menggunakan teknik member checking. Creswell (2013) menjelaskan bahwa teknik “member checking” berarti membawa kembali hasil penelitian sementara kepada informan penelitian untuk mengecek keakuratan data dari penelitian yang dilakukan dan telah disusun. Dalam teknik ini, peneliti bisa melakukan wawancara ulang demi mendapatkan data yang lebih akurat.

Selanjutnya data dianalisis melalui beberapa tahapan. Miles dan Huberman dalam Silalahi (2009) menyebutkan terdapat tiga

tahapan dalam analisis data yaitu: 1) reduksi data (data reduction), memilih hal-hal yang paling menarik dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, kemudian mencari topik dan polanya, 2) penyajian data (data display), dilakukan untuk mengumpulkan data lalu dikelompokkan yang membuatnya lebih mudah untuk disimpulkan atau mengusulkan kegiatan, 3) penarikan kesimpulan (verifikasi), Keputusan diambil berdasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Guna memperjelas hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya penulis akan membahas terkait fakta yang diperoleh dari lokasi penelitian. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:

Bagaimana implementasi kebijakan kartu tani di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Kartu tani merupakan hasil dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Kingsley Davis dalam Soekanto (2012, p. 262) mendefinisikan perubahan sosial merupakan “perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat”. Perubahan struktur yang dimaksud yaitu adanya peraturan baru yang diberlakukan kepada para petani dalam melakukan pembelian pupuk bersubsidi. Berikut ini akan diuraikan hasil yang didapatkan dari penelitian tentang implementasi kebijakan penggunaan kartu tani di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dimana terdapat beberapa indikator keberhasilan dalam implementasi kebijakan kartu tani ini.

a. Komunikasi

Penyampaian informasi yang dilakukan melalui sosialisasi jika dilakukan dengan baik akan menjadi acuan petani dalam bertindak dan beradaptasi terhadap kebijakan Kartu Tani di Desa Barugae. Sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Penyuluh Pertanian dari Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang yaitu memberikan informasi tentang bagaimana keunggulan dari penggunaan kartu tani dan manfaat yang didapatkan petani jika menggunakan kartu tani. Adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah oleh pihak Bank BRI memberikan informasi tentang bagaimana cara membuat kartu tani dan bagaimana cara menggunakannya untuk

transaksi pembelian pupuk bersubsidi. Selanjutnya, setelah sosialisasi dilakukan maka akan dilakukan penginputan data petani yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi.

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa sosialisasi yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang dan pihak Bank BRI nyatanya belum optimal karena masih terdapat petani yang tidak tahu menggunakan Kartu Tani. Dari hasil wawancara diketahui petani yang belum tahu cara menggunakan Kartu Tani adalah petani yang sudah tua dan tidak paham tentang cara kerja perbankan.

b. Sumber Daya

Implementasi kebijakan kartu tani di Desa Barugae memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari Tim Verifikasi dan Validasi, Tim Penyuluh Pertanian dibentuk oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, pihak Bank BRI sebagai penerbit Kartu Tani, kios pengecer sebagai penyedia pupuk bersubsidi dan pihak petani sebagai pengguna Kartu Tani. Selain SDM terdapat pula sumber daya lainnya yaitu sumber daya peralatan. Peralatan dalam implementasi program kartu tani adalah Perangkat Uji Tanah Sawah mesin *EDC (Electronic Data Capture)* dan yang pastinya adalah pupuk subsidi itu sendiri.

Perangkat Uji Tanah Sawah diberikan Kementerian Pertanian kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang yang selanjutnya penggunaan Perangkat Uji Tanah Sawah di Desa Barugae dilakukan oleh Tim Penyuluh Pertanian yang bertugas di Desa Barugae. Pengujian tanah dilakukan secara berkala oleh Tim Penyuluh Pertanian dengan mengambil sampel tanah sawah petani dari kedalaman tertentu lalu diuji dengan Perangkat Uji Tanah Sawah. Apabila petani Desa Barugae menginginkan untuk dilakukan pengujian tanah di lahan sawahnya namun Tim Penyuluh Pertanian tidak dapat ke lokasi sawah karena suatu alasan maka petani dapat membawa sampel tanah sawahnya langsung ke Dinas Pertanian untuk dilakukan pengujian. Hasil dari pengujian tanah ini akan menentukan teknik pemupukan dan campuran pupuk yang baik bagi petani sesuai dengan kondisi tanah sawahnya.

Mesin *EDC (Electronic Data Capture)* merupakan mesin milik pihak Bank BRI yang dipinjamkan kepada setiap pemilik kios pengecer pupuk bersubsidi untuk digunakan dalam proses transaksi pembelian pupuk bersubsidi

menggunakan kartu tani. Apabila dikemudian hari terdapat kendala atau kerusakan pada mesin *EDC (Electronic Data Capture)* tersebut maka pemilik kios pengecer dapat langsung melaporkannya kepada pihak Bank BRI untuk selanjutnya akan diberikan alat yang baru.

Jumlah jatah pupuk subsidi yang diberikan oleh Kementerian Pertanian kepada Kabupaten Pinrang masih kurang dari jumlah kebutuhan. Kuota pupuk yang diberikan masih kurang dan memaksa Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang untuk bijak mengatur agar kekurangan pupuk ini tidak memengaruhi hasil panen petani. Selain pihak Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang yang mencari solusi atas kekurangan pupuk, petani juga sering berinisiatif untuk membeli pupuk non subsidi yang harganya lebih mahal demi memenuhi kebutuhan pupuk di wilayah pertaniannya.

c. Disposisi

Setiap pelaksana kebijakan implementasi program kartu tani di Desa Barugae seperti Tim Verifikasi dan Validasi dan Tim penyuluh Pertanian merupakan tenaga profesional yang dibentuk oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, begitupun pihak Bank BRI. Setiap pelaksana kebijakan sangat paham apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Selain itu, setiap pelaksana kebijakan program kartu tani di Desa Barugae juga sudah paham akan tantangan yang mereka hadapi dan tetap menjalankan tugasnya sebagai bentuk profesionalitas.

Apresiasi dan insentif merupakan hal yang terdengar sederhana namun memiliki pengaruh terhadap motivasi dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, dalam pelaksanaan program Kartu Tani di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang ternyata tidak terdapat apresiasi ataupun insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaksana kebijakan yang melaksanakan tugasnya dengan baik.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan Program Kartu Tani, salah satu aspek yang penting adalah *Standard Operational Procedures (SOP)*. Terdapat perubahan cara pelunasan pupuk bersubsidi dengan kartu tani di Desa Barugae Kabupaten Pinrang. Perubahan tersebut adalah petani tidak lagi harus melakukan pengisian saldo di kartu tani mereka terlebih dahulu jika ingin membeli pupuk bersubsidi melainkan dapat dilakukan dengan pembayaran

tunai. Penyebab perubahan cara pelunasan ini dikarenakan adanya keluhan dari petani yang menganggap proses pengisian saldo kartu tani terlalu sulit mereka lakukan karena biasanya mereka baru melakukan pengisian saldo dan pembelian pupuk ketika mereka akan ke sawah. Pelunasan pupuk subsidi dengan uang tunai sudah disetujui oleh Dinas Pertanian yang artinya perubahan tersebut sudah sesuai dengan SOP yang berlaku di Kabupaten Pinrang.

Diberlakukannya perubahan metode pelunasan pupuk bersubsidi dengan Kartu Tani ini merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga hubungan antara pihak petani dan pemerintah agar tetap saling terkoneksi dan agar petani tidak merasa terberatkan atas pola baru yang diperkenalkan oleh pihak pemerintah dan agar pihak pemerintah dapat terus melanjutkan program Kartu Tani.

Faktor-faktor apa yang memengaruhi implementasi kebijakan kartu tani di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Dalam sistem kebijakan publik selain terdapat elemen atau unsur kebijakan publik terdapat pula faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan publik. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan program kartu tani di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

a. Lingkungan Kebijakan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Moko pada tahun 2017, pertimbangan implementasi program Kartu Tani pada suatu daerah dilihat dari keadaan wilayah, potensi sumber daya alam, lingkungan petani, serta dukungan instansi terkait (Moko et al., 2017). Desa Barugae merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Duampanua. Kecamatan Duampanua sendiri menjadi kecamatan dengan luas wilayah persawahan terluas di kabupaten Pinrang yaitu seluas 15.328 hektar (ha), menjadikan Desa Barugae memiliki andil dalam produksi padi di Kabupaten Pinrang dan menjadi lokasi yang sangat cocok untuk implementasi program Kartu Tani. Selain itu, pihak pemerintah Kabupaten Pinrang juga mendukung implementasi Program Kartu Tani dilaksanakan di wilayah Kabupaten Pinrang.

b. Pembuat dan Pelaku Kebijakan

Kementerian Pertanian selaku pembuat kebijakan memiliki tanggung jawab untuk menentukan atau memengaruhi bentuk dari kebijakan dalam hal pelaksanaan, pengawasan, evaluasi serta hasil dari kebijakan Kartu Tani. Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang serta pihak pelaku kebijakan lainnya bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Pinrang terkhusus di Desa Barugae. Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang telah berusaha semaksimal mungkin demi pelaksanaan program kartu tani yang lebih baik meskipun mendapatkan beberapa hambatan pada jaringan internet dan jumlah pupuk yang masih kurang dari total kebutuhan.

Segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam program Kartu Tani ini merupakan tindakan yang dipilih untuk menjaga pola perilaku yang sudah terbentuk dan sudah berjalan di lingkungan pertanian di Kabupaten Pinrang. Menjaga pola perilaku yang ada menjadi tanggung jawab yang besar agar sistem yang sudah berjalan dapat terus dijalankan dan dikembangkan demi mencapai hasil yang diinginkan.

c. Kebijakan itu Sendiri

Program Kartu Tani merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui penyaluran pupuk bersubsidi dan telah diatur dalam “Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020”.

Penggunaan kartu tani oleh petani baru dapat dimulai pada tahun 2020, selain mengikuti dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 hal ini dikarenakan proses verifikasi dan validasi data petani yang memakan waktu lama. Diungkapkan oleh salah satu informan di hasil penelitian bahwa jumlah petani yang terdaftar di Kecamatan Duampanua adalah sebanyak \pm 14.000 orang.

d. Kelompok Sasaran Kebijakan

Popkin dalam Darmawan Salman (2016, p. 46) mengatakan bahwa pada dasarnya petani berperilaku rasional dan tidak sepenuhnya mengikut pada moral kolektivitas desa. Apabila petani dipertemukan dengan sesuatu inovasi yang menyangkut tentang pertanian maka petani

memiliki kemampuan untuk melakukan adaptasi. Walaupun pada kenyataannya setiap petani memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengadopsi inovasi. Implementasi kebijakan kartu tani di Desa Barugae saat ini sudah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya dikarenakan beberapa alasan.

Terdapat perbedaan persepsi antara petani terhadap implementasi Kartu Tani di Desa Barugae. Pendapat pertama mengatakan bahwa program kartu tani telah membantu petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dan membantu mengurangi biaya pembelian pupuk. Namun pendapat lainnya mengatakan bahwa secara umum mereka belum mendapatkan manfaat dari implementasi program kartu tani dikarenakan berbagai permasalahan seperti pada layanan administratif yang sulit membuat petani susah mendapatkan pupuk bersubsidi, jumlah pupuk bersubsidi yang kurang dari jumlah kebutuhan yang tertera di RDKK kelompok tani, dan munculnya kecurigaan masyarakat bahwa adanya kecurangan penyaluran pupuk yang belum mampu diselesaikan oleh pemerintah. Tidak adanya jenis pupuk ZA dan SP-36 dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Barugae yang semakin menambah kecurigaan masyarakat akan adanya kecurangan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pengawasan pemerintah.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Rais (2021), menjelaskan bahwa penggunaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Pinrang tidak berpengaruh nyata terhadap efektivitas petani. Dijelaskan pula bahwa adanya perbedaan harga pupuk bersubsidi dan non subsidi tidak berpengaruh pada petani karena baik sebelum atau sesudah adanya Kartu Tani petani tetap membeli pupuk non subsidi untuk memenuhi kebutuhan. Artinya keberadaan Kartu Tani sebagai media penyaluran pupuk bersubsidi belum dirasakan manfaatnya oleh petani.

Dalam aspek sosiologis terdapat dinamika sosial yang terjadi dalam program Kartu Tani. Dinamika sosial tersebut antara lain:

a. Perubahan Cepat

Perubahan cepat sebagai bentuk dinamika sosial dalam program Kartu Tani dikarenakan setiap petani yang menggunakan Kartu Tani akan berusaha untuk beradaptasi dengan kondisi yang senantiasa mengalami perkembangan dalam hal teknologi pertanian. Petani juga selalu menyesuaikan diri dengan kondisi baru yang

muncul seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat.

b. Perubahan yang Dikehendak

Menurut Agustang (2021) Perubahan yang dikehendaki adalah "perubahan yang telah direncanakan atau diperkirakan sebelumnya oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat". Kartu Tani telah melalui berbagai tahapan persiapan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum diimplementasikan di masyarakat, melalui program Kartu Tani juga untuk memberikan hak petani akan pupuk dan membiasakan petani dengan sistem perbankan agar petani dapat mengikuti perkembangan teknologi.

c. Perubahan Besar

Perubahan besar menurut Agustang (2021) adalah "perubahan yang terjadi dan berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya, seperti dalam sistem kerja, sistem hak milik tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi masyarakat". Dinamika sosial dalam bentuk perubahan besar pada program Kartu Tani karena program ini bertujuan untuk membawa perubahan yang besar bagi masyarakat terkhususnya para petani karena melalui program Kartu Tani ini petani dapat memperoleh banyak kegunaan untuk memberikan kemudahan bagi petani dan bagi masyarakat secara umum. Walaupun hingga saat ini program Kartu Tani belum dapat memenuhi ekspektasi pemerintah dan petani itu sendiri.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi program Kartu Tani di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang oleh sejumlah petani dianggap telah membantu untuk mengurangi biaya pembelian pupuk. Meski demikian oleh sejumlah petani lain menganggap bahwa secara umum implementasi Kartu Tani belum memberi pengaruh bagi petani karena program Kartu Tani mendapati permasalahan yaitu pada jumlah alokasi pupuk yang nyatanya belum memenuhi kebutuhan petani serta tidak disalurkan pupuk subsidi jenis SP-36 dan ZA padahal terdapat dalam daftar pupuk subsidi di Kabupaten Pinrang. Selain itu tidak ada apresiasi atau insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak pelaksana tugas yang telah melakukan tugasnya dengan baik.

Saran

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta berguna bagi peneliti lain sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Bagi pemerintah penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan lagi layanan dalam program Kartu Tani terkhusus pada jumlah distribusi pupuk bersubsidi.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustang, A. 2021. *Dinamika Sosial Kelompok Tani (Studi Kasus Petani Bawang merah Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)*. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* (2614-8854)
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik indonesia 2020*. Katalog: 1101001.
- Badan Pusat Statistik Pinrang. (2019). *Kecamatan Duampanua Dalam Angka Tahun 2019*. Katalog: 1102001.7315.070.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementan. (2021). *Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021. Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi*.
- Kominfo, A. (2020). *Bupati Pinrang Pantau Ketersediaan Pupuk Bagi Petani | Pemkab Pinrang*. <https://pinrangkab.go.id/bupati-pinrang-pantau-gudang-pupuk/>
- Moko, K. dkk. (2017). *Perbedaan Persepsi Petani Terhadap Program Kartu Tani Di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen*. *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture*, 32(1), 9–13.

- Mufidah, N., & Prabawati, I. (2018). Implementasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani Di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 6(9). <https://ejournal.unesa.ac.id>.
- Permendag. (2013). Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013.
- Rais, M., dkk. (2021). Pengaruh Penggunaan Pupuk Bersubsidi terhadap Efektivitas Petani di Kelompok Tani Tosalamae Kabupaten Pinrang. *LaGeografia*, 19(3),
- Salman, D. 2016. *Sosiologi Desa Revolusi senyap dan Tarian Kompleksitas*. Makassar: Innnaa.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refrika Aditama
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wahid, A. A., Gayatri, S., & Prayoga, K. (2020). Problematika Implementasi Program Kartu Tani Di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. *Universitas Diponegoro: Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*.